

**ANALISIS FAKTOR PENENTU KEBIJAKAN UMR DI INDONESIA**

**TAHUN 2006-2015**

**JURNAL**



Oleh:

Nama : Wulandari Putri Purhadiyanto

Nomor Mahasiswa : 14313372

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

**2018**

# **ANALISIS FAKTOR PENENTU KEBIJAKAN UMR DI INDONESIA**

**TAHUN 2006-2015**

**WULANDARI PUTRI PURHADIYANTO**

**Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia**

[Wulandri55@gmail.com](mailto:Wulandri55@gmail.com)

## **ABSTRAKSI**

Upah Minimum Regional (UMR) adalah standar minimum upah yang harus diterima oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dalam waktu satu bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang berpengaruh pada penentuan kebijakan upah minimum pada tahun periode 2006-2015. Faktor-faktor yang dianalisis adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan periode tahun 2006-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan data runtut waktu *timeseries* dari tahun 2006 sampai 2015, dan *cross section* sebanyak 33 provinsi di Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil regresi terbaik pada penelitian ini adalah menggunakan metode regresi *Fixed Effect Model* yang diketahui variabel KHL, PDRB, dan IPM signifikan secara positif, sedangkan inflasi tidak signifikan berpengaruh terhadap UMR di Provinsi Indonesia.

*Kata kunci: UMR, UMP, Upah Minimum, Upah Minimu Regional, Upah Minimum Provinsi, KHL, PDRB, Inflasi, dan IPM*

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, terdapat regulasi tingkat upah minimum perprovinsi yang berbeda-beda setiap provinsinya. Dari perbedaan penetapan tingkat upah minimum ini, tiap provinsi menentukannya sesuai dengan standar biaya untuk kebutuhan hidup yang ada di tiap provinsinya. Pemerintah memperhatikan jumlah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam penetapan tingkat upah minimum tersebut. Namun, penetapan ini tingkat upah minimum masih 90% dari jumlah yang sesuai dengan KHL yang ada. Pada dasarnya tingkat harga yang dicerminkan pada jumlah KHL yang ada akan selalu dan naik dan diikuti dengan kenaikan upah pula. Namun kenaikan pada dua hal tersebut tidak terjadi secara bersama-sama dan besar kenaikannya pun juga tidak akan sama.

Keadaan tersebut bisa terus mengalami kenaikan karena semakin lama, dari tahun ke tahun barang pasti akan mengalami kenaikan harga dan susah sekali untuk mengalami penurunan. Keadaan ini membuat para pekerja mau tidak mau harus tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja lebih giat. Ketika terjadi kenaikan harga barang-barang secara umum atau inflasi, dengan keadaan upah yang diterima jumlahnya tetap maka pendapatan riil pekerja mengalami penurunan. Karena itulah pekerja akan menuntut kenaikan upah pula. Namun kemampuan perusahaan dalam memberikan upah yang lebih besar lagi adalah suatu keputusan yang berat. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam permasalahan ini.

Permasalahan upah ini adalah masalah yang agak rumit untuk penyelesaiannya terutama dalam bidang industri. Seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf-paragraf sebelumnya mengenai pemahaman upah yang berbeda dari sisi pemberi upah dan penerima upah. Peraturan mengenai hal ini seharusnya bisa dipertimbangkan dari segala perspektif pemahaman yang ada, seperti dalam pemenuhan hak para pekerja dan juga pemenuhan untuk kelangsungan jalan perusahaan. Maka dari itu diharapkan dan diperlukan adanya skala upah pekerja bagi perusahaan, serta persetujuan dalam pelaksanaan kebijakan upah minimum ini dengan matang dan mempertimbangkan semua aspek. Hal ini dilakukan dalam

upaya untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja dan perusahaan yang member upah dengan seimbang.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian pada jurnal yang dilakukan di Pulau Jawa Tengah dengan periode tahun 2008-2011 mendapatkan tingkatan nominal upah yang berbeda-beda dari setiap daerah. Jurnal ini menganalisis bagaimana pengaruh dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap upah minimum regional di Pulau Jawa. Metode analisis yang digunakannya adalah metode regresi data panel *Random Effect Model* (REM), dengan jenis data gabungan dari *time series* periode tahun 2008-2011 dengan *cross section* 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari kesimpulan ini adalah pertumbuhan dan inflasi secara parsial berpengaruh pada tingkat upah minimum regional. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif, sedangkan inflasi berpengaruh secara negatif pada upah minimum regional di Jawa Tengah (Charysa, 2013).

Dalam penelitian pada jurnal yang dilakukan di Pulau Jawa dengan periode tahun 2010-2014 ini menganalisis bagaimana pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan perkapita, Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap upah minimum regional di Pulau Jawa. Metode analisis yang digunakannya adalah metode regresi data panel *Random Effect Model* (REM), dengan jenis data gabungan dari *time series* periode tahun 2010-2014 dengan *cross section* provinsi di Pulau Jawa. Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa . Hasil dari kesimpulan ini adalah PDRB dan TPAK berpengaruh secara negatif pada upah minimum regional di Pulau Jawa, pendapatan perkapita berpengaruh secara negatif pada upah minimum regional di Pulau Jawa. Sedangkan IHK tidak berpengaruh pada upah minimum regional di Pulau Jawa (Nurtiyas, 2016).

Dalam penelitian pada jurnal yang dilakukan di Provinsi di Indonesia dengan periode tahun 2001-2008 ini menganalisis bagaimana pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kemampuan Hidup Minimum (KHM), Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap upah minimum regional di Pulau Jawa. Metode analisis yang digunakannya adalah metode regresi data panel *Fixed Effect Model*, dengan jenis data gabungan dari *time series* periode tahun 2001-2008 dengan *cross section* 28 provinsi di Indonesia. Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Hasil dari kesimpulan ini adalah PDRB, KHM dan IHK signifikan berpengaruh pada upah minimum regional di Provinsi Indonesia (Desmiwati, 2013).

Dalam penelitian pada jurnal yang dilakukan di Pulau Jawa dengan periode tahun 2014 ini menganalisis bagaimana pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap upah minimum regional di Pulau Jawa. Metode analisis yang digunakannya adalah metode regresi spasial linier berganda, dengan jenis data spasial area sebagai pendekatannya dengan *cross section* seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari kesimpulan ini adalah PDRB dan IHK signifikan berpengaruh secara negatif, sedangkan KHL signifikan berpengaruh secara positif pada upah minimum regional di Provinsi Indonesia (Merdekawati, 2016).

Dalam penelitian pada jurnal yang dilakukan di Yogyakarta dengan periode tahun 1993-2010 ini menganalisis bagaimana pengaruh dari inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan SMP, tingkat pendidikan SMA, dan tingkat pendidikan Sarjana terhadap upah minimum regional di Yogyakarta. Metode analisis yang digunakannya adalah metode regresi data *time series Mackinno, White, and Davidson* (MWD) dengan jenis data *time series* dari tahun 1993 sampai 2010 di Yogyakarta. Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Yogyakarta. Hasil dari kesimpulan ini adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan SMA, dan tingkat pendidikan Sarjana signifikan berpengaruh secara positif, sedangkan pengangguran signifikan

berpengaruh secara negatif pada upah minimum regional di Yogyakarta. Namun untuk tingkat pendidikan SMP tidak signifikan berpengaruh pada upah minimum regional di Yogyakarta (Nindya, 2012).

Dalam penelitian pada jurnal yang dilakukan di Pulau Jawa dengan periode tahun 2009-2012 ini menganalisis bagaimana pengaruh dari penyerapan tenaga kerja dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap upah minimum regional di Pulau Jawa. Metode analisis yang digunakannya adalah metode regresi data panel *Fixed Effect Model*, dengan jenis data gabungan dari *time series* periode tahun 2009-2012 dengan *cross section* 5 provinsi di Pulau Jawa. Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa. Hasil dari kesimpulan ini adalah penyerapan tenaga kerja signifikan berpengaruh secara negatif, sedangkan IPM signifikan berpengaruh secara positif pada upah minimum regional di Pulau Jawa (Susanto, 2015).

Dalam penelitian pada jurnal yang dilakukan di Provinsi Indonesia dengan periode tahun 2015 ini menganalisis bagaimana pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia dan Kemampuan Hidup Minimum (KHL) terhadap upah minimum regional provinsi di Indonesia. Metode analisis yang digunakannya adalah metode regresi linier berganda, dengan jenis data gabungan dari *time series* tingkat upah minimum regional perbulan, tingkat IPM, dan KHM pada tahun 2015. Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Hasil dari kesimpulan ini adalah IPM dan KHM berpengaruh secara positif pada upah minimum regional di Provinsi Indonesia (Yanty, 2017).

## **HIPOTESIS PENELITIAN**

- 1) Jumlah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) diduga berpengaruh positif terhadap tingkat Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia

- 2) Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diduga berpengaruh positif terhadap tingkat Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia
- 3) Tingkat inflasi diduga berpengaruh negatif terhadap tingkat Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia
- 4) Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diduga berpengaruh positif terhadap tingkat Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia
- 5) Semua variabel independen diduga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Upah Minimum Regional di Indonesia

## **METODE PENELITIAN**

### **Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini digunakan KHL, PDRB, Inflasi, dan IPM sebagai variabel independen dan Tingkat UMR sebagai variabel dependen.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan data panel atau disebut regresi model panel. Data panel adalah gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data waktu (*time series*). Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Selanjutnya terjadi pembentukan model *fixed effects*. Efek tetap dimaksudkan bahwa satu objek observasi memiliki konstanta yang tetap untuk beberapa periode waktu. Demikian juga koefisien regresinya akan tetap dari waktu ke waktu. Maka persamaan model ini sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta' X_{it} + \varepsilon_{it}$$

Ket:

$\beta'$  = koefisien intersep

- Xit = banyaknya data panel (variable)  
 i = banyaknya individu/unit observasi (provinsi)  
 t = banyaknya waktu (periode tahun 2006-2015)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel	Coefficient	t-statistic	Prob.	Keterangan
LOG(UMR)	-2.695132	-9.400675	0.0000	Signifikan
LOG(KHL)	0.651442	20.1715	0.0000	Signifikan
LOG(PDRB)	0.617444	11.99964	0.0000	Signifikan
INF	0.001086	0.619974	0.5358	Tidak Signifikan
IPM	0.014414	4.60718	0.0000	Signifikan

Sumber: Olahan Data Dengan *E-views 9*

### 1) Jumlah Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Dari hasil yang didapatkan yang tertera pada tabel 4.13 didapatkan nilai probabilitas dari KHL sebesar  $0.0000 < \text{Alpha } 0.05$ . Ini berarti bahwa KHL signifikan berpengaruh terhadap perkembangan upah minimum provinsi di Indonesia. Serta pengaruhnya positif pada nilai *coefficient* 0.651442, artinya jika terjadi kenaikan pada jumlah KHL sebesar 1% maka akan diikuti kenaikan pada tingkat upah minimum sebesar 0.651442%. Dari penjelasan di atas, analisis ini sesuai dengan penelitian yang dijelaskan oleh (Desmiwati, 2013 dan Merdekawati, 2016), yang menyatakan bahwa jumlah KHL berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat upah minimum. Karena peran KHL mencerminkan dari tingkat kebutuhan minimum yang harus dipenuhi para pekerja. Sehingga ketika jumlah kebutuhan tersebut meningkat maka pemerintah juga harus memperhatikan kemampuan mereka dalam pemenuhan kebutuhannya tersebut dengan cara memperhitungkan kembali tingkat upah minimum



sebelumnya dengan jumlah KHL yang meningkat. Sehingga para pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

## 2) Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dari hasil yang didapatkan yang tertera pada tabel 4.13 didapatkan nilai probabilitas dari PDRB sebesar  $0.0000 < \text{Alpha } 0.05$ . Ini berarti bahwa PDRB signifikan berpengaruh terhadap perkembangan upah minimum provinsi di Indonesia. Serta pengaruhnya positif pada nilai *coefficient* 0.617444, artinya jika terjadi kenaikan pada jumlah PDRB sebesar 1% maka akan diikuti kenaikan pada tingkat upah minimum sebesar 0.617444%. Dari penjelasan di atas, analisis ini tidak sesuai dengan hasil analisis (Nurtyas, 2016), yang menyatakan bahwa jumlah PDRB signifikan berpengaruh secara negatif. Namun analisis ini sesuai dengan penelitian yang dijelaskan oleh (Desmiwati, 2013), yang menyatakan bahwa jumlah PDRB berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat upah minimum. Bahwa dalam penetapan upah minimum pemerintah dan yang berwenang menggunakan PDRB dalam penentuan tingkat upah minimum. Ketika terjadi peningkatan pada PDRB tingkat upah minimum juga akan di tingkatkan. Peningkatan output ini merupakan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, sehingga bisa menunjukkan kinerja para pekerja.

## 3) Inflasi

Dari hasil yang didapatkan yang tertera pada tabel 4.13 didapatkan nilai probabilitas dari Inflasi sebesar  $0.5358 > \text{Alpha } 0.05$ . Ini berarti bahwa inflasi tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap perkembangan upah minimum provinsi di Indonesia. Hasil regresi data panel pada penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak signifikan dan tidak berpengaruh pada penentuan tingkat upah minimum provinsi di Indonesia. Analisis ini tidak sama dengan hasil penelitian (Charysa, 2013), yang menyatakan bahwa inflasi signifikan berpengaruh negatif terhadap upah minimum. Namun, analisis ini sesuai dengan penelitian (Ilham, 2013) yang hasil penelitiannya tidak sesuai juga dengan teori yang ada, bahwa inflasi berhubungan dengan tingkat upah. Dimana ketika terjadi peningkatan harga

atau inflasi mengakibatkan nilai riil upah menurun dan membuat rugi para pekerja.

#### **4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Dari hasil yang didapatkan yang tertera pada tabel 4.13 didapatkan nilai probabilitas dari IPM sebesar  $0.0000 < \text{Alpha } 0.05$ . Ini berarti bahwa IPM signifikan berpengaruh terhadap perkembangan upah minimum provinsi di Indonesia. Serta pengaruhnya positif pada nilai *coefficient* 0.014414, artinya jika terjadi kenaikan pada jumlah IPM sebesar 1% maka akan diikuti kenaikan pada tingkat upah minimum sebesar 0.014414%. Hasil ini sesuai dengan penjelasan (Susanto, 2015 dan Yanty, 2017), bahwa hubungan antara IPM dengan tingkat upah minimum itu berpengaruh. IPM adalah salah satu ukuran pembangunan pada kualitas manusia di suatu negara, yang bisa juga dijadikan cerminan kinerja para pekerja. Dimana ketika para kualitas kinerja para pekerja semakin baik dalam bekerja, maka akan semakin disukai para perusahaan dan menguntungkan perusahaan. Di sini lah dimana tingkat upah akan menjadi lebih tinggi, dan membuat perhatian untuk menentukan tingkat upah minimum.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data analisis yang menggunakan aplikasi *e-views 9* terhadap hipotesis yang telah disusun dan telah diatur sebelumnya. Dapat disimpulkan dan didapat dari penelitian ini adalah:

- 1) Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa jumlah Kemampuan Hidup Layak (KHL) berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat

upah minimum. Ini berarti ketika terjadi peningkatan pada jumlah KHL maka akan meningkatkan pula tingkat upah minimum provinsi di Indonesia.

- 2) Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat upah minimum. Ini berarti ketika terjadi peningkatan pada jumlah PDRB maka akan meningkatkan pula tingkat upah minimum provinsi di Indonesia.
- 3) Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah minimum. Ini berarti ketika terjadi peningkatan atau penurunan pada inflasi tidak akan mempengaruhi tingkat upah minimum provinsi di Indonesia.
- 4) Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan secara positif terhadap tingkat upah minimum. Ini berarti ketika terjadi peningkatan pada IPM maka akan meningkatkan pula tingkat upah minimum provinsi di Indonesia.

### **Implikasi**

Dari hasil analisis pengaruh jumlah Kemampuan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap penetapan tingkat upah minimum provinsi di Indonesia pada periode tahun 2006-2015 didapatkan beberapa implikasi, yaitu:

- 1) Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan upah minimum ini sesuai dengan keadaan dan kondisi pada kenyataan, dan mampu diterima oleh para pemberi upah dan buruh. Sehingga menciptakan hubungan yang baik setara dan seimbang antara para pekerja dan perusahaan dalam perjanjiannya.
- 2) Pemenuhan perhatian dalam jumlah kebutuhan minimum para pekerja bahkan masyarakat sebaiknya lebih baik lagi. Karena tingkat upah minimum saat ini masih sekitar 90% pada pemenuhan kebutuhan hidup

secara layak. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

- 3) Dalam penetapan upah ini pemerintah harus tetap memperhatikan hubungannya antara inflasi, karena terjadinya inflasi secara langsung akan menaikkan beberapa harga barang kebutuhan sehingga pengeluaran tersebut juga akan meningkat.
- 4) Hendaknya pemerintah memperhatikan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia, terutama pada penekanan inflasi pada daerah-daerah tertentu yang tingkat inflasinya tinggi. Bisa dilakukan subsidi untuk para perusahaan dalam kegiatan produksi produsen yang akan menurunkan biaya produksi mereka dan membuat harga output menurun dan stabil. Sehingga inflasi dapat terkendali dan upah nominal para pekerja sebanding dengan upah riilnya.
- 5) Diperlukan kesesuaian antara sistem kebijakan pengupahan dengan sasaran kebijakan dan keterlibatan pihak terkait yang diharapkan lebih baik lagi perhatiannya dalam memonitoring penetapan upah para pekerja yang diberikan kepada para pekerja secara layak.

### **Daftar Putaska**

Badan Pusat Statistik. (2017). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*. Retrieved 10 10, 2017, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab1|accordion-daftarsubjek1>

- Charysa, N. N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Upah Minimum Regional di Kabupten/Kota di Jawa Tengah. *Economics Development Journal*, Vol. 2, No. 4 , 277-285.
- Desmiwati. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Upah Minimum di Indonesia 2001-2008. *Tesis S-2 (Tidak Dipublikasikan)*, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia. Jakarta .
- Feriyanto, N. (1997). Upah Minimum Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 2 , 196-204.
- Gidi, M. (2016, 02). *Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*. Retrieved 10 28, 207, from Ekonomi Pembangunan: <http://www.ilmuekonomi.net/2016/02/pengertian-indeks-pembangunan-manusia-ipm-lengkap.html>
- Human Development Report. (1995). In *Human Development Report*. New York: Oxford Univeesity Press 1995.
- Mankiw, N. G. (2013). *Pengantar Ekonomi Edisi Asia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mc Cafferty, Stephen. (1990). *Macroeconomic Theory*. New York: Harpercollins College Div.
- Merdekawati, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan metode Autoregressive (SAR). *Jurnal Gaussian*, Vol. 5, No. 3 , 525-534.
- Nindya, F. H. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Nurtiyas, F. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa 2010-2014. *Skripsi Sarjana (Tidak*

*Dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta .*

- Putri, D. (2016). Analisis Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Tahun 2006-2014. *Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.*
- Riadi, M. (2012, 10). *Gaji dan Upah*. Retrieved 09 2017, from Kajian Pustaka: <http://www.kajianpustaka.com/2012/10/gaji-dan-upah.html>
- Sari, Izzati, dan Rafika. (2013). Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 5, No. 2* , 131-145.
- Sion, J. (2014, 11). *Kebijakan Upah Minimum Regional Terhadap Perekonomian Indonesia*. Retrieved 05 2017, from Blogspot: <http://bikelase.blogspot.co.id/2014/11/kebijakan-upah-minimum-regional.html>
- Sukirno, S. (2014). *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, B. S. (2015). Penyerapan Tenaga Kerja dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Upah Minimum di Indonesia. *Journal of Management, Vol. 1, No.1* , 21-32.
- Syafei, B. (2013, 11 11). *Upah Minimum dan Kesejahteraan Buruh*. Retrieved 05 2017, from wordpress: <https://deroe.wordpress.com/2013/10/31/upah-minimum-dan-kesejahteraan-buruh/>
- Wibowo, A. (2011). Retrieved 10 11, 2017, from Digilib Unila: <http://digilib.unila.ac.id/6537/17/BAB%20II.pdf>
- Yanty, R. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Kebutuhan Hidup Minimum terhadap Upah Minimum Regional di Indonesia Tahun 2015. *Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.*

